



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 2342-2347

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Peningkatan Tarif Perizinan TKA Terhadap Arus Kas Perusahaan Jasa Perizinan di Surabaya

Sherla Aulia Vanessa¹, Yuli Kurniawati²

^{1,2}Akuntansi, STIE Mahardika Surabaya

sherlavanessa@gmail.com¹, yuli.kurniawati@stiemahardika.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perubahan regulasi pemerintah berupa peningkatan biaya perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mempengaruhi pengelolaan arus kas dan keberlangsungan bisnis perusahaan penyedia jasa pengurusan perizinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis secara mendalam dampak kenaikan biaya pengurusan izin TKA terhadap arus kas perusahaan pengurusan perizinan, sekaligus menganalisa strategi adaptasi yang diterapkan oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan staf keuangan perusahaan jasa pengurusan perizinan, pengamatan, dan analisis dokumen keuangan yang bersifat internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan biaya perizinan TKA hingga 56% berdampak pada penurunan arus kas bersih, yang dapat mempersempit likuiditas, dan memaksa perusahaan untuk melaksanakan efisiensi biaya serta melakukan penyesuaian tarif layanan kepada pelanggan, sehingga peluang untuk memperluas usaha menjadi terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memperdalam pemahaman mengenai dinamika arus kas di sektor jasa perizinan akibat perubahan kebijakan pemerintah, serta merekomendasikan perlunya upaya sosialisasi kebijakan yang lebih efisien dan inovasi dalam manajemen kas. Sebagai kesimpulan, peningkatan tarif perizinan TKA memberikan dampak signifikan terhadap arus kas sehingga dapat menghambat operasional perusahaan jasa perizinan, sehingga dibutuhkan respons adaptif dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan kelangsungan usaha.

Kata kunci: Arus Kas, Perusahaan Jasa, Kebijakan Pemerintah, Perizinan TKA

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasidan penyatuan ekonomi dunia, pergerakan tenagakerja antar negara semakin meningkat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, keberadaan pekerja asing telah berperan signifikan dalam komposisi pasar tenaga kerja, terutama pada bidang-bidang yang memerlukan keterampilan khusus dan teknis yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pekerja lokal. Namun, pergerakan ini juga menghadirkan berbagai tantangan administratif dan regulasi yang rumit. Salah satunya adalah aturan perizinan untuk pekerja asing yang diterapkan oleh negara yang menerima mereka.

Pemerintah Indonesia melalui regulasi seperti PP Nomor 45 Tahun 2024 menetapkan perubahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi warga negara asing yang ingin masuk dan tinggal di Indonesia, seperti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan lainnya. Kenaikan tarif dan rumitnya proses perizinan ini telah menimbulkan beban keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pengurusan izin TKA[1]. Dibandingkan dengan tahun 2023, rata-rata PNBP yg mengalami kenaikan signifikan yaitu pada proses pengurusan visa dan izin tinggal terbatas sebesar 56%. Isu ini krusial untuk dianalisis karena berhubungan dengan aspek kelangsungan sektor jasa profesional yang secara langsung berkontribusi pada kegiatan ekonomi dan lapangan kerja global. Dari sudut pandang sosial-ekonomi, tekanan arus kas yang dihadapi oleh perusahaan jasa pengelolaan perizinan tenaga kerja asing tidak hanya memengaruhi efisiensi internal perusahaan, tetapi juga pada ekosistem layanan ketenagakerjaan dan kestabilan hubungan industri.

Arus kas operasional perusahaan bisa terhambat ketika biaya pengurusan melonjak secara tiba-tiba tanpa adanya penyesuaian dalam kontrak dengan klien[2]. Temuan ini diperkuat oleh pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan pelaku industri yang mengungkapkan bahwa likuiditas harian dan sirkulasi kas perusahaan seringkali terpengaruh akibat adanya skema pembayaran di muka

yang kurang fleksibel. Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji pengaruh biaya operasional terhadap keuntungan dan kinerja finansial, tetapi masih jarang yang secara khusus menyelidiki arti dan dinamika arus kas dari sudut pandang pelaku usaha di bidang jasa perizinan, terutama dalam kaitannya dengan regulasi tenaga kerja asing[3]. Situasi ini menghasilkan kekurangan dalam literatur yang signifikan, di mana penelitian kualitatif bisa menggali lebih dalam mengenai makna, pandangan, dan strategi bertahan yang diterapkan oleh perusahaan jasa saat menghadapi tekanan biaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dengan menekankan pada analisis arus kas yang disebabkan oleh peningkatan biaya pengurusan izin tenaga kerja asing, melalui studi kasus pada perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan perizinan tenaga kerja asing. Metode kualitatif dipilih agar dapat memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan biaya ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris yang mendalam, tetapi juga menyumbang secara teoritis dalam pengembangan konsep manajemen arus kas dalam sektor jasa yang terpengaruh oleh regulasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis pengaruh kenaikan biaya pengurusan izin TKA terhadap arus kas perusahaan pengurusan perizinan, sekaligus menganalisa strategi adaptasi yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan empiris tentang tantangan finansial perusahaan penyedia jasa perizinan. Fokus kajian ditujukan kepada pengelolaan keuangan, masalah-masalah yang dihadapi, dan dampak sosial ekonomi yang timbul. Diharapkan, kontribusi praktis dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan dalam merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait pengelolaan izin TKA.

Dengan menggunakan teori manajemen keuangan dan regulasi perizinan sebagai landasan, serta pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman konteks dan pengalaman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam literatur dan praktik manajemen arus kas di perusahaan pengurusan perizinan tenaga kerja asing di Indonesia.

2. Metode Penelitian

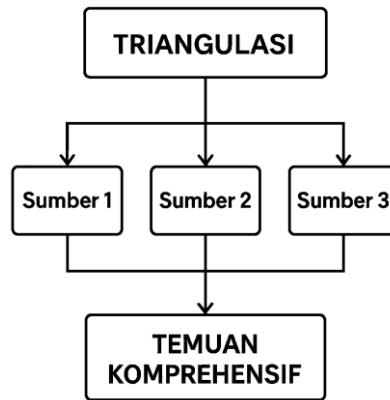
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk meneliti secara mendalam efek dari kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) izin tinggal dan kunjungan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia terhadap kondisi arus kas perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan izin TKA di Surabaya. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, pengalaman, dan sudut pandang para aktor di perusahaan secara kontekstual, serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami fenomena secara keseluruhan sesuai dengan ciri khas penelitian kualitatif yang menyoroti makna dan interaksi sosial dalam situasi yang alami[4].

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengacu pada kombinasi teori arus kas dan teori biaya dalam manajemen keuangan, yang selanjutnya diterapkan dalam konteks peningkatan biaya administratif untuk izin tenaga kerja asing. Kerangka ini berperan sebagai dasar untuk mengevaluasi dampak kenaikan biaya tersebut terhadap arus kas di perusahaan yang menyediakan layanan perizinan tenaga kerja asing, serta strategi yang digunakan dalam pengelolaannya. Pendekatan kualitatif yang digunakan akan memperluas wawasan tentang dinamika internal perusahaan saat berhadapan dengan perubahan besar dalam biaya operasional.

2.1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa teknik seperti melakukan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan informan yaitu staf keuangan dan manajemen perusahaan. Observasi partisipatif juga dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi), arsip internal, dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan tarif keimigrasian[5]. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber dari luar berupa artikel berita dan peraturan pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan kebijakan tarif tenaga kerja asing, untuk memperkaya data dan memperluas konteks analisis.

2.2. Validasi Data



Gambar 1. Metode Triangulasi

Uraian:

- Sumber 1 = Wawancara
- Sumber 2 = Data Internal perusahaan
- Sumber 3 = Informasi media

Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi, yakni menggabungkan berbagai sumber data, teknik, dan informan. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan dua kelompok informan utama (manajemen dan keuangan) serta melakukan observasi terhadap situasi internal perusahaan, lalu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi internal perusahaan (laporan keuangan) yang menunjukkan adanya penurunan laba perusahaan pada tahun 2025. Kemudian, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi perusahaan dan mengonfirmasi data melalui media dan regulasi pemerintah[5]. Metode triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kevalidan dan kredibilitas data dalam penelitian[6].

2.3. Analisis Data

Dimulai dari transkripsi hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Data kemudian disederhanakan dan dikategorikan berdasarkan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu arus kas perusahaan sebagai dampak kenaikan tarif pengurusan perizinan tenaga kerja asing (TKA). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman serta menarik kesimpulan yang komprehensif.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak kenaikan biaya pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) terhadap arus kas dari perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan perizinan. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan, staf administrasi, serta direktur operasional di tiga perusahaan yang beroperasi di bidang jasa pengurusan izin TKA di Surabaya. Selain itu, observasi non-partisipatif terhadap aktivitas operasional harian dan analisis dokumen keuangan internal juga membantu dalam memperdalam pemahaman.

3.1. Profil dan Arus Kas Perusahaan

Tabel 1. Analisa SWOT

| Uraian | |
|----------------------|--|
| Strengths (Kekuatan) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas untuk pengenaan biaya perizinan TKA. • Perusahaan jasa pengurusan perizinan ini memiliki pengalaman dan jaringan yang memperkuat pososo kompetitif. |

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan akan layanan pengurusan perizinan. |
| Weaknesses (Kelemahan) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan regulasi berupa kenaikan tarif perizinan menjadi tekanan arus kas pada perusahaan perizinan. • Kerumitan dalam proses pengajuan izin membawa kemungkinan terjadinya penundaan dan biaya yang lebih tinggi. |
| Opportunities (Peluang) | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dari pemerintah yang mendukung transformasi digital dan mempermudah prosedur perizinan[7]. • Terdapat potensi peningkatan klien sejalan dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia • Perusahaan jasa menambah layanan seperti konsultasi terkait regulasi TKA akan memiliki nilai tambah. |
| Threats (Ancaman) | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan regulasi mengenai peraturan meningkatkan ancaman terhadap usaha dan perencanaan finansial. • Risiko hukum dan saksi administratif jika tidak memenuhi ketentuan perizinan dapat mengganggu keberlangsungan usaha. |

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan analisa swot maka bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan perizinan tenaga kerja asing (TKA). Pada tabel analisis swot disebutkan salah satu kelemahan perusahaan yang sedang dialami yaitu terkena dampak langsung dari perubahan regulasi pemerintah sejak ditetapkannya peraturan pemerintah yaitu Desember 2024. Data keuangan yang ditelaah meliputi laporan arus kas untuk periode 2021–2025, dengan penekanan pada arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dan biaya pengurusan perizinan. Selain laporan arus kas, dilakukan juga analisa terhadap laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi untuk mengetahui sebesar apa dampak perubahan regulasi ini terhadap perusahaan dengan cara menganalisa penurunan laba dari tahun ke tahun. Kenaikan tarif perizinan tersebut telah memberikan tekanan signifikan terhadap arus kas perusahaan karena harus menyesuaikan dengan tarif layanan.

3.2. Ketidakseimbangan antara Arus Kas Masuk dan Beban Operasional

Meskipun terdapat upaya penyesuaian tarif kepada klien baru, tidak semua biaya dapat dikompensasi secara penuh. Setiap perusahaan klien juga memiliki alur dan proses pembayaran tagihan yang berbeda, sebelum adanya perubahan regulasi sebagai bentuk menjaga agar klien tidak mudah beralih ke kompetitor perusahaan jasa disini juga memberikan fasilitas berupa kelonggaran pembayaran tagihan kepada klien dibandingkan perusahaan kompetitor lainnya. Dalam perubahan regulasi ini sebagai jasa pengurusan perizinan harus menyampaikan serta mengatur lebih ketat terkait penagihan pembayaran dari klien karna kenaikan tarif perizinan yang telah dibayarkan di awal (talangan pembayaran) jumlahnya juga meningkat sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan jasa. Namun hasil wawancara terdapat temuan jika perusahaan mengalami kesulitan terhadap penetapan biaya terbaru kepada klien, manajemen operasional menyampaikan, “Jika kami naikkan tarif terlalu tinggi, klien lari ke kompetitor. Tapi jika tetap, margin kami makin tipis.” Hal ini menciptakan ketimpangan antara arus kas masuk dan pengeluaran rutin perusahaan, sebagaimana terkonfirmasi dalam laporan kas perusahaan.

3.3. Keterkaitan Temuan dengan Teori Arus Kas

Dalam situasi sekarang, peningkatan biaya izin mengakibatkan penurunan arus kas bersih, sehingga peluang untuk memperluas usaha menjadi terbatas. Ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingginya biaya regulasi berdampak buruk terhadap kemampuan pendanaan internal bagi layanan profesional[8]. Berdasarkan data biaya proses yang dikeluarkan perusahaan jasa pengurusan perizinan terdapat 2 pengurusan yang signifikan yaitu pada pengurusan visa single entry maupun multiple entry serta izin tinggal terbatas (ITAS) yang mengalami rata-rata kenaikan tarif PNBK hingga 56%, hal tersebut tentunya berpengaruh pada proses pengurusan perizinan, karena dalam proses pengurusan izin TKA perusahaan pengurusan perizinan ini harus mengeluarkan biaya proses lainnya salah satunya merupakan biaya akomodasi yang semua biaya prosesnya harus dibayar di

awal, serta besarnya risiko sanksi administratif perusahaan jasa jika tidak memenuhi ketentuan atau ada kesalahan dalam proses perizinan nilainya bisa berlipat-lipat lebih tinggi dari pendapatannya. Maka dari itu telatnya pembayaran tagihan klien ke perusahaan jasa sangat berdampak pada operasional perusahaan layanan jasa.

3.4. Strategi Adaptasi Manajemen Keuangan

Dalam menghadapi tekanan arus kas, perusahaan melakukan beberapa strategi adaptasi. Staf keuangan mengungkapkan, "Kami melakukan penyesuaian jadwal pembayaran, menegosiasikan ulang kontrak dengan klien, dan mulai memperketat pengeluaran lain." Selain itu, perusahaan juga mulai mengedukasi klien tentang perubahan tarif dan mempercepat proses penagihan agar arus kas tetap terjaga. Observasi langsung menunjukkan adanya perubahan alur kerja internal yang lebih disiplin dalam pengelolaan kas harian.

3.5. Kecenderungan Penggunaan Pembiayaan Alternatif

Demi mencukupi operasional, perusahaan mulai menggunakan dana pribadi atau mencari pendanaan dari rekan bisnis sebagai cara sementara untuk mengatasi tekanan kas. Pada penemuan ini menggarisbawahi kelemahan sistem keuangan di sektor layanan membutuhkan cepatnya arus kas.

3.6. Diskusi

Temuan dari penelitian ini menekankan kenyataan bahwa modifikasi dalam kebijakan publik, khususnya mengenai peningkatan tarif izin tenaga kerja asing, berdampak langsung pada aspek keuangan perusahaan yang bergerak di bidang layanan perizinan. Dari aspek keuangan, beban pada kas operasional menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem modal kerja yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Hal ini menegaskan temuan bahwa perusahaan dalam bidang jasa cenderung memiliki struktur kas yang lebih mudah terpengaruh dibandingkan dengan sektor manufaktur, akibat dari siklus penerimaan yang lebih lama dan terbatasnya aset likuid. Dalam teori, hal ini mendukung landasan pemikiran dari *Contingency Theory* yang mengungkapkan bahwa organisasi perlu melakukan penyesuaian pada struktur dan proses internalnya seiring dengan perubahan di lingkungan eksternal.

Secara sosial, hasil ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan layanan antara perusahaan dan pelanggan. Saat perusahaan hanya menyediakan layanan kepada pelanggan yang membayar sepenuhnya di muka, akan ada diskriminasi tidak langsung terhadap pelaku usaha kecil atau pelanggan dengan keterbatasan arus kas. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan hukum resmi, yang dalam jangka panjang dapat mendorong praktik informal yang bertentangan dengan tujuan peraturan yang ada.

Penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk studi lebih lanjut mengenai keefektifan strategi digitalisasi dalam mempertahankan arus kas, serta penelitian perbandingan antara perusahaan jasa di berbagai wilayah. Pemikiran kritis dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pelaku bisnis dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam bisnis jasa perizinan tenaga kerja asing, sehingga tidak hanya dapat menjaga kestabilan arus kas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan[9], [10]. Kekurangan dari penelitian ini adalah penekanan yang sangat khusus pada perusahaan yang bergerak dalam layanan perizinan, sehingga penerapan temuan ini pada sektor lain memerlukan studi lebih dalam. Riset selanjutnya bisa menyelidiki efek jangka panjang dari meningkatnya biaya terhadap keberlangsungan usaha di tengah perubahan kebijakan imigrasi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya pengelolaan izin untuk tenaga kerja asing (TKA) yang disebabkan oleh perubahan regulasi pemerintah pada PP Nomor 45 Tahun 2024 yaitu terdapat kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 56% jika dibandingkan dengan tahun peraturan pemerintah sebelumnya, hal ini berdampak besar terhadap arus kas perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengurusan perizinan. Analisis terhadap PT X di Surabaya mengindikasikan bahwa peningkatan biaya yang terus berlanjut sejak tahun 2024 telah mengakibatkan penurunan arus kas operasional secara terus-menerus, meskipun pendapatan terus mengalami pertumbuhan. Hasil ini menjelaskan bahwa adanya tekanan dari regulasi keuangan dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan jasa yang bergantung pada biaya tetap, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran di muka kepada pemerintah yang berupa PNBP. Secara keseluruhan, implikasi dari

kebijakan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan layanan perizinan untuk menerapkan sistem pembayaran di awal (uang muka) dari klien. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi piutang usaha, tetapi juga memperkuat keuangan perusahaan agar tetap stabil dan berkelanjutan ketika menghadapi biaya yang semakin rumit dan tak terduga.

Referensi

- [1] D. F. Ramadhani, "Analisis Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia," *Academia.Edu*, vol. 2, no. 2, pp. 51–58, 2021.
- [2] P. Penelitian, D. A. N. Pengabdian, and D. Tempat, *AKUNTANSI DAN MANAJEMEN BISNIS UMKM* :, no. 35. 2024. [Online]. Available: <https://repository.pradita.ac.id/id/eprint/565>
- [3] H. Ernanto and S. Hermawan, "Table Of Content Article information Rechtsidee," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 14, no. 3, pp. 6–14, 2022, [Online]. Available: <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1148>
- [4] F. Malahati, A. U. B. P. Jannati, Q. Qathrunnada, and S. Shaleh, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *J. Pendidik. Dasar*, vol. 11, no. 2, pp. 341–348, 2023, doi: 10.46368/jpd.v11i2.902.
- [5] M. S. Ummah, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 11, no. 1. 2019. [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [6] P. Studi, I. Ekonomi, P. Doktor, F. Bisnis, D. A. N. Ekonomika, and U. I. Indonesia, "TERHADAP HUBUNGAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN EFISIENSI INVESTASI: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Oleh : TERHADAP HUBUNGAN KUALITAS PELAPORAN Oleh :," 2024, [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51180>
- [7] S. D. Dan and M. Data, "Standar data dan metadata data," 2022, [Online]. Available: https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/09/files/publikasi/1665367053005_2022%2520-%2520Kepmen%252095%2520thn%25202022%2520tentang%2520Standar%2520Data%2520dan%2520Metadata%2520Ketenagakerjaan.pdf
- [8] N. L. Fikriah, *PENYUSUNAN MANAJEMEN LAPORAN KEUANGAN DAN KEWIRAUSAHAAN (BUSINESS PLAN)*. [Online]. Available: <http://repository.uin-malang.ac.id/20784/1/20784.pdf>
- [9] N. S. Husna, R. Octaviani, Z. Sahara, and U. Usiono, "Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Peserta Didik Kelas Iii Di Mis Al-Wardah," *Khazanah Pendidik.*, vol. 18, no. 1, p. 53, 2024, doi: 10.30595/jkp.v18i1.20311.
- [10] A. Rahmat, A. Ntalu, and M. Mimawati, "Teknik Keterampilan Menulis Artikel Model IMRAD dengan standar Sinta, Scopus dan WOS," *AKSARA J. Ilmu Pendidik. Nonform. 1383*, vol. 9, no. 02, pp. 1383–1390, 2023, [Online]. Available: <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>
